

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Daerah otonom yang baik adalah suatu daerah yang dapat mengatur otonomi daerahnya dengan ciri pengelolaan dibidang keuangannya. Tahap tata kelola keuangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Adapun tata kelola keuangan daerah berkaitan dengan seberapa besar peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemerintahan dan seberapa besar kontribusi OPD dalam menjalankan bagian-bagian manajemen keuangan daerah. Jika tata kelola keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka berakibat pada peluang terjadinya tindak korupsi yang akan mengakibatkan kesengsaraan pada masyarakat di daerah tersebut.

Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi fenomena adanya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas di aktivitas sektor publik. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak pemegang amanah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan kepada pihak pemberi amanah atas seluruh aktivitas yang harus dipertanggungjawabkannya yang berkuasa dan berwenang meminta pertanggungjawaban terhadap pihak pemegang amanah, untuk dapat menciptakan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan (Mardiasmo, 2002). Tata kelola keuangan daerah harus sesuai berbagai prinsip *good governance* bernilai ekonomis, efisien dan efektif..

Pada UU No 17/2003 dan UU No 32/2004 adalah 2 regulasi yang menjadi acuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pemerintahan yang sudah diselenggarakannya.

Asas transparansi dan akuntabilitas adalah asas penentu bagi seluruh aktivitas dan *output*-nya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada public atas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai *good governance*, salah satu komponennya adalah pengelolaan keuangan yang baik (Pertiwi, 2015).

Laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hasil laporan keuangan haruslah berprinsip tepat waktu dan regulasi PP No 24 Tahun 2005 menjadi tumpuan penyusunan SAP (Nurillah, 2014). Setelah memenuhi prinsip tersebut kemudian laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilaporkan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum.

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk menjadi gambaran kinerja pada suatu pemerintahan. Maksud dari adanya laporan keuangan yakni sebagai sarana penyampaian informasi yang berkaitan dengan arus kas, kinerja serta posisi keuangan pada suatu pemerintahan yang sedikit atau banyak dapat memiliki manfaat bagi seluruh pemakai laporan keuangan dalam rangka memutuskan perekonomian (IAI, 2011). Namun, laporan tersebut tidak diharuskan untuk menyajikan secara menyeluruh semua informasinya yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

pada saat diambilnya suatu keputusan yang mengandung unsur ekonomi, karena umumnya akan dipaparkan pada laporan tersebut dampak dari kondisi keuangan, peristiwa yang telah berlalu, dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan suatu informasi disajikan dengan selengkap mungkin.

Pengelolaan keuangan daerah yang masih buruk di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saat ini dikarenakan faktor penerapan SAP yang tergolong masih buruk di pemerintahan. Dengan hal itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan pembenahan. Salah satu hal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang bermutu yaitu terbatasnya pemahaman SDM mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP.

Kunci keberhasilan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kapasitas SDM yang ada, yaitu pada tingkat kelembagaan, sistem, ataupun individu dan didukung dengan perencanaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan harapan SDM pada bagian akuntansi yang mengelola keuangan daerah bisa dan dapat menjalankan fungsi dan tugas akuntansinya sebaik mungkin agar tercipta suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain kapasitas SDM, untuk meraih efektivitas pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem pengendalian intern. Agar dapat melakukan pengelolaan keuangan seefektif mungkin dibutuhkan sistem kendali internal yang cukup. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan runtutan metode yang

ditetapkan pemerintah daerah untuk memberi keyakinan sepenuhnya atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan aktivitas.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi maka dibutuhkan kompetensi SDM yang cukup dan mampu memahami pemerintahan daerah dari sisi aktivitas, keuangan, ataupun akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna sebab hasilnya akan dipergunakan oleh para *stakeholder* sebagai acuan keputusan ekonomi yang akan diambil. Suatu informasi dapat dikatakan bermanfaat jika pengambilan keputusan dapat terbantu oleh informasi itu dan seluruh pengguna laporan keuangan dapat memahaminya.

Hasil penelitian Pertiwi (2015) mengemukakan bukti empiris bahwa, konsep *value for money* sebagai pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas secara positif signifikan. Berbeda dengan penelitian Putra (2017) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas, sedangkan pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh transparansi. Hasil penelitian lain yaitu penelitian Andriani (2010), yang menemukan bukti empiris bahwa keterandalan LKPD secara signifikan dipengaruhi oleh kapasitas SDM. Artinya, suatu informasi dapat dikatakan andal bila ada dukungan SDM yang mumpuni. Dan hasil penelitian Maksyur (2015) menyebutkan jika kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh sistem pengendalian intern. Namun, hal tersebut belum tentu sama pada instansi lain sebab adanya perbedaan kondisi OPD.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Hanafiah, Abdullah, dan Saputra (2016). Perbedaan antara penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitiannya. Dengan adanya perbedaan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI DI OPD KABUPATEN KENDAL)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai manfaat yang sangat penting di suatu entitas pemerintahan. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yaitu laporan keuangan. Salah satu manfaat laporan keuangan yaitu sebagai gambaran keadaan suatu pemerintahan dan sebagai suatu cara bagi pemerintah daerah untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka pengajuan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh atas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah Transparansi berpengaruh atas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh atas Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Apakah Pengawasan Intern berpengaruh atas Pengelolaan Keuangan Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada penelitian ini untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas atas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengaruh Transparansi atas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia atas Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Pengaruh Pengawasan Intern atas Pengelolaan Keuangan Daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan penelitian adalah mampu memberi manfaat untuk semua pihak yang membaca ataupun pihak yang terkait dengan tema penelitian yang diambil. Manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan bisa memberi pengetahuan/pandangan lebih mengenai pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi dan akuntansi keuangan daerah pada khususnya.
  - b. Sebagai bahan referensi atau memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bisa memberi manfaat bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kendal untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.